

## **DINAMIKA SD INPRES DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 1973-1983**

Oleh : Rika Ayu Oktavia, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, [oktaviarika358@gmail.com](mailto:oktaviarika358@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Memasuki masa Orde Baru pendidikan menjadi kebijakan yang diutamakan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan dalam bidang pendidikan yang dicanangkan Pemerintah Orde Baru adalah Program Bantuan Sekolah Dasar untuk meningkatkan jumlah anak-anak usia 7-12 tahun yang belum tertampung di sekolah yang telah ada. Kebijakan SD Inpres yang dicanangkan Pemerintah Orde Baru khususnya di Kabupaten Bantul sangat menarik untuk dilihat bagaimana perkembangan dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui latar belakang kebijakan SD Inpres, mengetahui pelaksanaan SD Inpres di Kabupaten Bantul 1973-1983, dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan SD Inpres di Kabupaten Bantul. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa latar belakang kebijakan SD Inpres adalah dikarenakan pada waktu itu masih banyak anak-anak yang belum bersekolah karena berbagai hal dan masih tingginya angka tingkat putus sekolah pada siswa, sarana dan prasarana untuk pendidikan yang masih kurang memadai guna melaksanakan proses belajar mengajar baik itu gedung, buku bacaan, maupun kurikulum. Pembangunan SD Inpres di Kabupaten Bantul mulai dilaksanakan tahun 1973/1974. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap. Adanya kebijakan SD Inpres di Kabupaten Bantul telah mempermudah orangtua untuk menyekolahkan anaknya yang akan memasuki kelas 1 tingkat sekolah dasar. Dampak lain yang ditimbulkan adalah sekolah-sekolah banyak berdiri di Kabupaten Bantul untuk mengimbangi pembangunan SD Inpres, dan adanya kebijakan ini telah mengurangi pengangguran.

Kata Kunci: Dinamika, SD Inpres, Bantul

### **Abstrack**

## **DYNAMICS OF presidential instruction elementary school IN BANTUL DISTRICT, 1973-1983**

**By: Rika Ayu Oktavia, History of Science Courses, Department of History Education, Faculty of Social Sciences, State University of Yogyakarta, [oktaviarika358@gmail.com](mailto:oktaviarika358@gmail.com)**

Entering the New Order era education became a policy that was prioritized by the government. One of the policies in the educational sector proclaimed by the New Order Government was the Primary School Assistance Program to increase the number of children aged 7-12 years old who had not been accommodated in existing schools. The policy of presidential instruction elementary school launched by the New Order Government, especially in Bantul District is very interesting to see how the development and the impact that caused to the people of Bantul District. The purpose of this paper is to find out the background of presidential instruction elementary school policy, to know the implementation of presidential instruction elementary school in Bantul District 1973-1983, and to know the impact of the presidential instruction elementary school policy in Bantul District. Construction of presidential instruction elementary school in Bantul District began in 1973/1974. This development is carried out in stages. In addition to supporting the policy of the presidential instruction elementary school the government also issued supporting programs including the construction of new buildings, the addition of textbooks and reading books, upgrading and appointment of teachers, improvement of facilities and infrastructure, as well as updating the curriculum. The policy of presidential instruction elementary school in Bantul Regency has made it easier for parents to send their children to school in first grade of elementary school. Another impact caused is many schools in Bantul district to offset the construction of presidential instruction Elementary School, and the existence of this policy has reduced unemployment.

Keywords: Dynamics, presidential instruction Elementary School, Bantul

## I. PENDAHULUAN

Sejak lahirnya Pemerintahan Orde Baru, pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam berbagai bidang menuntut pemerintah melaksanakan perbaikan terutama dalam bidang politik dan ekonomi, dimana pendidikan memegang peranan penting. salah satu misi utama Pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan yang sistematis dan terencana ialah melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini tercermin dalam Ketetapan MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Atas dasar ketetapan itu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kehendak untuk membangun sistem pendidikan diawali dengan komitmen bangsa Indonesia terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dan sebagai tujuan akhir.<sup>1</sup> Pada awal pemerintahan Orde Baru banyak anak-anak usia sekolah (7-12 tahun) yang tidak sempat menikmati pendidikan, dan banyak anak-anak yang meninggalkan sekolah karena berbagai alasan. Alasan ini menjadi masalah untuk mencapai tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini kemudian menuntut pemerintah untuk melakukan berbagai usaha pendidikan bagi seluruh agar tercapainya tujuan pendidikan yang tercantum dalam Ketetapan MPR. Untuk mengurangi hal tersebut, maka terdapat kebijakan khusus yaitu pemberantasan buta huruf. Kebijakan itu kemudian dilanjutkan dengan kebijakan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar untuk mendukung kebijakan sebelumnya.

Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bertujuan untuk menciptakan keadaan sehingga setiap orang mempunyai kesempatan yang sama guna memperoleh pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku,

---

<sup>1</sup> Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 149.

kesempatan pendidikan tersebut tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, maupun agama. Keinginan untuk melakukan pemerataan kesempatan belajar bersamaan dengan naiknya harga minyak bumi pada pertengahan dekade 1970-an. Hal itu membuat Indonesia memperoleh dana tambahan guna mempercepat beberapa sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana-sarana fisik lainnya yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan nasional. Di bidang pendidikan, dana tersebut digunakan untuk pemerataan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Maka untuk pertama kali muncul program Inpres (Instruksi Presiden) yang termasuk didalamnya program Inpres bantuan pembangunan sekolah dasar.<sup>2</sup>

Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar diutamakan di sekolah dasar melalui pembangunan unit gedung baru untuk menampung tambahan murid sebanyak 720.000 orang selama Repelita II sehingga daya tampung meningkat menjadi 20,9 juta anak pada Repelita III. Usaha perluasan dan pemerataan kesempatan belajar sejak Repelita III terus dilanjutkan melalui peningkatan daya tampung sekolah untuk mengakomodasi penduduk usia sekolah. Upaya-upaya tersebut mencakup pembangunan unit gedung baru, penambahan ruang kelas baru pada sekolah yang sudah ada, dan rehabilitasi gedung sekolah yang sudah ada.<sup>3</sup> Pemerintah menetapkan dana sebesar Rp. 15.8 milyar untuk program bantuan sekolah dasar tersebut. Pembangunan unit-unit baru SD yang setiap unit terdiri dari 3 ruang kelas dengan perincian 6.000 unit di tahun 1973/1974, 6.000 unit di tahun 1974/1975 dan 10.000 unit di tahun 1975/1976.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2017), hlm. 198.

<sup>3</sup> Wardiman Djojonegoro, *op.cit*, hlm 170.

<sup>4</sup> C.E Beeby, *Pendidikan Di Indonesia Penilaian dan Pedoman Perencanaan*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 68.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan suatu penelitian ilmiah akan dibutuhkan metode dalam pengerjaannya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah atau metode historis. Metode historis merupakan salah satu penyelidikan dengan mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis. Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah terdapat lima tahapan, namun pada penelitian skripsi ini hanya menggunakan empat tahapan penelitian. Empat tahapan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, Heuristik merupakan tahapan pengumpulan data atau sumber informasi yang akan dijadikan acuan dalam penulisan. Heuristik merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang dikenal dengan data sejarah. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang ditulis<sup>5</sup>. Heuristik mempunyai tujuan yakni agar kerangka pemahaman yang didapatkan berdasarkan sumber-sumber yang relevan, yang bisa disusun jelas, lengkap dan menyeluruh.<sup>6</sup> Dalam rangka heuristik, seseorang yang melakukan penelitian pasti mengunjungi tempat-tempat yang menyimpan sumber penelitian. Proses selanjutnya yaitu kritik sumber atau verifikasi. Setelah sumber sejarah ditemukan, seorang peneliti melakukan kritik terhadap sumber yang akan digunakan dalam penelitian. Hasil dari kritik sumber sangatlah berpengaruh terhadap tahap berikutnya, karena pada tahap berikutnya bertumpu pada tahap kritik sumber. Adapun fungsi kritik sumber berpengaruh terhadap penelitian sehingga karya sejarah merupakan produk dari suatu proses yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hasil dari suatu fantasi, manipulasi, atau fabrikasi sejarawan.<sup>7</sup> Kritik sumber meliputi 2 jenis tahapan, yaitu, kritik ekstern dan kritik intern. Tujuan dari kritik ekstern adalah untuk mengetahui apakah sumber pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah atau tidak.<sup>8</sup> Kritik

ekstern digunakan untuk menilai keabsahan sumber, misalnya jenis kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, dan kalimat untuk mengetahui otentitas sumber.<sup>9</sup> Kritik intern lebih merujuk pada kredibilitas ataupun kebiasaan dipercayainya sebuah sumber.<sup>10</sup> Kritik intern digunakan untuk mengetahui validitas isi sumber. Kritik intern merupakan pemeriksaan terhadap isi sumber yang bertujuan untuk membuktikan kesaksian dan pernyataan sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Tahap selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah yang sebelumnya telah diverifikasi. Interpretasi memiliki dua macam yaitu analisis dan sintesis. Penguraian fakta sejarah yang ada disebut analisis. Penciptaan fakta baru dengan menafsirkan dan menyatukan berbagai fakta yang ada disebut sintesis. Setiap peneliti sejarah yang jujur pasti memiliki sintesis yang berbeda meskipun berangkat dari sumber yang sama, karena sejarawan akan mencantumkan data dari keterangan yang ia peroleh. Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai bidang subjektivitas.<sup>11</sup> Tahap terakhir dari penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan. Penulisan sejarah terikat pada prosedur penelitian ilmiah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. KONDISI AWAL SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BANTUL

Pendidikan di Negara Indonesia memiliki beberapa jenjang tingkat pendidikan, salah satunya adalah pendidikan Sekolah Dasar (SD). Pendidikan SD merupakan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia.<sup>12</sup> Fungsi pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal dasar pengembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Pendidikan dasar juga berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Oleh karena itu tiap-tiap warga negara diwajibkan menempuh pendidikan yang sekurang-kurangnya dapat

<sup>5</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 90.

<sup>6</sup> Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 89.

<sup>7</sup> Helius Sjamsudin, *op.cit.*, hlm. 103.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>9</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 77.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>11</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 78.

<sup>12</sup> Fuad Yulianto, "Dinamika SD Inpres di Kota Magelang Tahun 1973-1983", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2016), hlm. 34.

membekali diri dengan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dasar.<sup>13</sup>

Mengingat bahwa pendidikan dasar merupakan bekal pokok yang harus diberikan kepada seluruh rakyat di tanah air, maka negara mempunyai kewajiban menyediakan sekolah dasar sehingga seluruh warga negara umur sekolah dasar dapat tertampung. Sementara itu, kepada seluruh warga negara diberikan pula kewajiban memperoleh pendidikan dasar tersebut. Dengan perkataan lain, semua warga negara diberikan apa yang dinamakan wajib belajar untuk tingkat pendidikan dasar.<sup>14</sup> Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah fasilitas pendidikan yang memadai. Fasilitas tersebut sebagai penunjang dalam menjalankan sistem pendidikan yang sudah dibuat oleh pemerintah.<sup>15</sup>

Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana pembelajaran. Prasarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah, dan berbagai media pembelajaran lain. Pendidikan dapat berjalan dengan baik jika mempunyai sarana dan prasarana yang baik pula, karena dengan hal tersebut ketika proses belajar mengajar, siswa dapat merasakan ketenangan serta kenyamanan di dalam ruang kelas. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan.<sup>16</sup>

Pada awal Pelita I (1968-1973) Kabupaten Bantul yang masuk ke dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih mempunyai permasalahan cukup kompleks dalam bidang pendidikan dasar. Gedung sekolah dasar untuk menampung anak-anak

jumlahnya sangat kurang. Selain itu masih kurangnya fasilitas gedung dan ruang belajar dengan perabotannya bagi murid juga menjadi kendala pendidikan pada saat itu. Gedung yang telah ada umumnya dalam keadaan rusak dan tidak memenuhi syarat kesehatan.<sup>17</sup>

Sarana pembelajaran lain yang cukup penting dalam pendidikan dasar adalah buku pelajaran dan buku bacaan. Pada saat itu di Bantul seperti keadaan sekolah di daerah lain yang kekurangan buku, pendidikan dasar di Bantul juga mengalami hal yang sama. Sekolah dasar yang ada kekurangan buku bagi murid dan guru, baik buku bacaan yang memang sudah langka terdapat di sekolah dasar maupun buku pelajaran pokok untuk setiap bidang studi. Pendidikan sekolah dasar pada saat itu juga kekurangan personil, baik personil guru dan penjaga sekolah maupun personil pelayanan pada kantor instansi pengelola sekolah dasar. Sampai tahun 1972 penanganan mengenai pembangunan gedung-gedung SD, sebagian besar dibangun secara gotong royong oleh masyarakat.<sup>18</sup>

## **B. AWAL BERDIRINYA SD INPRES DI KABUPATEN BANTUL**

Sekolah Dasar Instruksi Presiden (SD Inpres) adalah program yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1973 melalui Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973. Program ini dilaksanakan di seluruh Indonesia sehingga pembangunan yang dilakukan merata. Adanya pembangunan SD Inpres diharapkan anak-anak usia sekolah dapat tertampung di SD, karena sebelum adanya kebijakan SD Inpres banyak anak-anak usia sekolah yang tidak tertampung di sekolah yang telah ada.

Pada tahun 1971 atau sebelum dicanangkannya kebijakan SD Inpres oleh Pemerintahan Presiden Soeharto, jumlah anak yang tidak bersekolah di Kabupaten Bantul

<sup>13</sup> Madyo Eko Susilo dan RB Kasihadi, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Semarang: Effhar Offset, 1993), hlm. 79-80.

<sup>14</sup> I.L. Pasaribu dan Simandjuntak, *Pendidikan Nasional: Tinjauan Paedagogik Teoritis*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 95.

<sup>15</sup> Fuad Yulianto, *op.cit.*, hlm. 35.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Propinsi DIY, *Laporan Pembangunan Propinsi DIY Selama Pelita II Tahun 1974/1975 s/d 1978/1979*, (Yogyakarta: Biro Pemerintah Sekretariat Wilayah Propinsi DIY, t.t.), hlm. 135.

<sup>18</sup> *Ibid.*

cukup banyak yaitu 186.647.<sup>19</sup> Jumlah ini tentu sangatlah wajar karena pada tahun tersebut pembangunan sekolah untuk Kabupaten Bantul belum mendapat bantuan dari pemerintah, sehingga pembangunan sekolah yang ada hanya berasal dari swadaya masyarakat dengan cara gotong royong. Melihat banyaknya anak yang tidak bersekolah di Kabupaten Bantul maka daerah ini berdasarkan Instruksi Presiden No 10 Tahun 1973 mendapat bantuan program pembangunan sekolah dasar. Dalam tahun anggaran 1973/1974 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima bantuan sebesar Rp. 219.500.000,-. Kemudian berdasarkan Inpres No. 6 tahun 1974 untuk anggaran tahun 1974/1975 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan bantuan untuk pembangunan gedung SD baru sebanyak 85 unit dengan keseluruhan biaya sebesar Rp. 219.500.000, dengan perincian sebagai berikut: Kabupaten Kuloprogo 14 unit, Kabupaten Bantul 19 unit, Kabupaten Gunungkidul 18 unit, Kabupaten Sleman 20 unit, Kotamadya Yogyakarta 14 unit<sup>20</sup>.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul mendapatkan bantuan sebesar 19 unit. Jumlah ini terbanyak setelah Kabupaten Sleman yang mendapat bantuan sebesar 20 unit. Dibandingkan dengan Kotamadya Yogyakarta wilayah ini hanya mendapatkan 14 unit, hal ini dikarenakan sulitnya menemukan lokasi untuk pembangunan gedung SD baru. Untuk penentuan pembangunan lokasi gedung SD masing-masing kabupaten/kotamadya ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang mendapatkan rekomendasi dari camat. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada: tingkat kesulitan komunikasi dan transportasi, daerah yang masih cukup terdapat anak usia sekolah yaitu 7-12 yang belum sempat mendapatkan kesempatan belajar di SD yang

telah ada, keamanan dan kesehatan, serta adanya fasilitas umum.<sup>21</sup>

### C. PELAKSANAAN SD INPRES DI KABUPATEN BANTUL

Usaha untuk melakukan pemerataan pendidikan terus dilakukan Pemerintah Orde Baru guna memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak usia sekolah yang belum tertampung di sekolah yang ada. Pendidikan sekolah dasar dianggap menjadi hal yang penting karena pada jenjang ini anak-anak akan diberikan bekal-bekal dasar perkembangan kehidupan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Itulah sebabnya pemerintah sangat menaruh perhatian penuh pada pendidikan sekolah dasar. Pembangunan SD ini dilakukan diseluruh pelosok Indonesia melalui Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973, yang nantinya untuk melanjutkan pembangunan tersebut akan keluar instruksi presiden berikutnya secara bertahap.

Pada tahun 1974/1975 berdasarkan Inpres No. 6 tahun 1974 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat bantuan 85 unit dengan biaya keseluruhan Rp. 219.500.000,-. Sementara untuk Kabupaten Bantul mendapat bantuan 19 unit dengan biaya sebesar Rp. 47.500.000,-. Dengan perincian per kecamatan mendapat Rp. 2.500.000,-.<sup>22</sup> Lokasi tersebut berada di Kecamatan Bantul, Sewon, Kasihan, Sedayu, Pajangan, Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, Bambanglipuro, Pundong, Imogiri, Jetis, Plered, Piyungan, Banguntapan, dan Dlingo. Dengan perincian satu kecamatan satu SD Inpres kecuali Kecamatan Plered dan Imogiri, di mana di kecamatan tersebut

<sup>19</sup> Biro Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 1971: Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Biro Pusat Statistik, 1971), hlm. 31.

<sup>20</sup> BPAD DIY, *Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Daftar Rekapitulasi Laporan Bulanan Pelaksanaan Pembangunan Gedung SD 1974/1975*, No. 6. 1974.

<sup>21</sup> Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi DIY, *Laporan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1982/1983*, (Yogyakarta: Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi DIY, 1983), hlm. 117-118.

<sup>22</sup> BPAD DIY, *Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Daftar Rekapitulasi Laporan Bulanan Pelaksanaan Pembangunan Gedung SD 1974/1975*, No. 6. 1974.

terdapat 2 SD Inpres.<sup>23</sup> Pembangunan gedung baru sekolah dasar tahun 1974/1975 ini diselesaikan pada bulan Juni 1975. Sedangkan untuk lokasi pembangunan gedung SD berada di lokasi yang sama dengan gedung sekolah dasar tahap pertama, dan merupakan kelanjutan dari pembangunan tahap pertama.<sup>24</sup>

Tahun 1975/1976 Kabupaten Bantul mendapat bantuan 40 unit. Di mana dalam setiap kecamatan mendapat bantuan 2 atau 3 unit bangunan SD. Biaya untuk pembangunan 2 unit SD adalah Rp. 8.000.000,- sedangkan biaya pembangunan 3 unit SD adalah Rp. 12.000.000. Kecamatan yang mendapat bantuan 2 unit diantaranya yaitu Sewon, Sedayu, Pajangan, Srandakan, Sanden, Kretek, Bambanglipuro, Pundong, Imogiri, Jetis, dan Plered. Sedangkan untuk kecamatan yang mendapat bantuan 3 unit adalah Bantul, Pandak, Piyungan, Banguntapan, dan Dlingo. Sehingga jumlah biaya keseluruhan pembangunan gedung SD untuk Kabupaten Bantul adalah Rp. 160.000.000,-.<sup>25</sup> Pada tahun 1975/1976 ini pula mulai diadakan rehabilitasi terhadap gedung-gedung SD yang sudah ada. Bantuan untuk rehabilitasi gedung SD negeri bagi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 121 unit dengan rata-rata biaya Rp. 500.000,- Untuk Kabupaten Bantul mendapat bantuan rehabilitasi gedung sebanyak 23 unit.<sup>26</sup> Karena dana bantuan yang relatif sedikit, sedangkan kondisi gedung SD yang akan direhabilitasi mengalami rusak parah maka SD yang mendapat bantuan rehabilitasi belum secara keseluruhan gedungnya direhabilitasi.

<sup>23</sup> Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selama Pelita II 1974/1975 s/d 1978/1979*, (Yogyakarta: Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Propinsi DIY, t.t), hlm. 175.

<sup>24</sup>BPAD DIY, *Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1974*, No. 6. 1974.

<sup>25</sup> Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Propinsi DIY (t.t), *op.cit.*, hlm.175.

<sup>26</sup> BPAD DIY, *Alokasi SD Inpres Tahun 1975/1976*, No. K 742, 1975.

Pembangunan gedung SD yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 1973-1974 telah dapat mengurangi jumlah anak usia sekolah yang awalnya tidak bersekolah. Hal itu dibuktikan dengan naiknya jumlah anak-anak yang ingin bersekolah. Pada awal tahun 1975 sudah terdapat 19 sekolah dasar di Kabupaten Bantul. Sekolah dasar tersebut dapat menampung siswa berjumlah 2189 anak. Meskipun pada saat itu hanya ada dua ruang kelas yang dibuka, namun hal tersebut sudah dapat mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah.<sup>27</sup>

Pembangunan gedung SD pada tahun 1976/1977 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat bantuan 150 unit dengan biaya Rp. 611.500.000,-. Untuk lokasi pembangunan gedung SD juga mengikuti lokasi pembangunan tahap pertama yaitu pada tahun 1975/1976. Pembangunan gedung SD di Kabupaten Bantul dilaksanakan pada bulan Agustus 1976 dan selesai pada bulan Februari 1977.<sup>28</sup> Kabupaten Bantul mendapatkan bantuan 40 unit. Pembagian per unit untuk setiap kecamatan sama dengan pembagian pada pembangunan tahap pertama tahun 1975/1976. Biaya yang digunakan juga sama dengan pembangunan tahun 1975/1976 yaitu sebesar Rp. 160.000.000,-. Bantuan tahap kedua pada tahun 1976/1977 ini disediakan untuk pembangunan 1 (satu) unit yang terdiri atas: tiga ruangan kelas yang segera dapat dipergunakan, kamar kecil, dan perabot sekolah.

Sebagaimana tahun 1975/1976 yang mendapat dana bantuan untuk rehabilitasi gedung SD, tahun 1976/1977 juga mendapat bantuan dana rehabilitasi. Awalnya rehabilitasi gedung SD hanya dilakukan untuk SD negeri, namun mulai tahun 1976/1977 rehabilitasi juga dilakukan pada SD swasta maupun MI

<sup>27</sup> BPAD DIY, *Daftar Sekolah Dasar Guru dan Murid Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bulan April 1975*, dalam Senarai Arsip Bagian Umum No. 1099.

<sup>28</sup> BPAD DIY, *Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1976/1977 Perincian Kemajuan Fisik Tiap Tiap Kabupaten/Kotamadya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, No. K5. I27. 1977.

(Madrasah Ibtidaiyah). Dana yang diberikan juga mengalami peningkatan dari yang awalnya Rp. 500.000,- menjadi Rp. 750.000,-<sup>29</sup>

Pada pelaksanaan pembangunan gedung SD tahun 1977 Kabupaten Bantul mendapat bantuan 60 unit dengan biaya Rp. 270.000.000,-. Jumlah bantuan yang diberikan cukuplah banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah ini juga masih akan bertambah untuk pembangunan gedung SD pada tahun yang akan datang. Penambahan jumlah bantuan ini diakibatkan oleh akan diadakannya wajib belajar pada tahun 1984, semakin banyak gedung SD yang dibangun maka semakin banyak pula anak-anak yang bersekolah. Hal ini tentu akan dapat mewujudkan wajib belajar yang telah direncanakan pemerintah.

Pada tahun 1978 selain untuk pembangunan gedung baru, periode ini juga untuk menambah ruang kelas. Alokasi dana untuk penambahan ruang kelas baru digunakan untuk memenuhi gedung SD negeri yang baru memiliki 3 ruang kelas, sehingga dengan penambahan ruang maka akan menjadi 6 kelas. Setelah itu baru akan dilakukan untuk menambah ruangan yang baru memiliki 4 ruang kelas menjadi 6 ruang kelas.

Pembangunan-pembangunan gedung SD baru di Kabupaten Bantul telah meningkatkan jumlah anak sekolah. Selama pelita II (1974-1978) Kabupaten Bantul telah dapat membangun gedung baru untuk SD Inpres sebanyak 219 unit. Kemudian pada tahun 1979 dari jumlah keseluruhan anak usia sekolah yaitu 97.149, sebanyak 95.715 anak sudah dapat tertampung dan yang masih belum tertampung adalah 1.443 anak. Ini menunjukkan bahwa para orangtua di Kabupaten Bantul sangat antusias untuk menyekolahkan anak-anaknya di SD Inpres.<sup>30</sup> Untuk mengimbangi pembangunan gedung SD maka dilakukan pengangkatan guru sekolah dasar. Dalam kurun waktu tahun 1973-1979 sebanyak 2776 guru telah diangkat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 1. Pembangunan Gedung-Gedung Sekolah Dasar Inpres

Pada akhir tahun 1973 Presiden Soeharto mencanangkan suatu kebijakan khususnya pendidikan dasar. Kebijakan tersebut adalah program bantuan pembangunan sekolah dasar atau lebih sering disebut dengan SD Inpres, melalui Instruksi Presiden No 10 Tahun 1973. Pengertian program bantuan pembangunan sekolah dasar menurut Instruksi Presiden No 10 Tahun 1973 adalah bantuan langsung atas APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk pembangunan gedung-gedung sekolah dasar dengan dilengkapi penyediaan guru, perabot sekolah dan buku-buku pelajaran pokok, disamping penyediaan buku bacaan kanak-kanak untuk perpustakaan sekolah dasar yang sudah ada. Tujuan dari dikeluarkannya instruksi tersebut adalah untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang akan memasuki kelas satu SD tetapi tidak dapat ditampung di SD yang sudah ada, terutama di daerah pedesaan dan di bagian daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.<sup>31</sup>

Pembangunan gedung SD yang dilakukan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat melainkan juga Pemerintah Daerah. Dalam hal ini kewajiban Pemerintah Daerah adalah menyediakan tanah yang luasnya cukup untuk pembangunan minimum 6 ruang kelas, ditambah dengan halaman yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya. Selain itu jika bantuan tidak mencukupi maka Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat dapat menambahnya. Dan untuk pemeliharaan gedung SD yang telah dibangun adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. Dana yang diperoleh untuk pembangunan ini berasal dari pemerintah.

## 2. Fasilitas

Fasilitas belajar adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Pada awal di

<sup>29</sup> Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (t.t), *op.cit.*, hlm. 143.

<sup>30</sup> Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Propinsi DIY (t.t), *op.cit.*, hlm. 187.

<sup>31</sup> BPAD DIY, *Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar*, Instruksi Presiden Republik Indonesia, No. 6, 1974.

dirikannya SD Inpres pada tahun 1973 fasilitas yang ada masih sangat sedikit. Oleh sebab itu pada setiap tahun pembangunan SD Inpres selalu diimbangi dengan pengadaan fasilitas supaya dapat mencapai tujuan pendidikan. Selain itu fasilitas yang baik akan membuat siswa dan guru merasa nyaman dalam proses pembelajaran.

### 3. Kurikulum

Kurikulum adalah sarana yang mengatur berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan disuatu negara dapat berubah sesuai dengan pemerintahannya. Memasuki masa Orde Baru sesuai dengan TAP MPRS (Majelis Permusyawaratan Perwakilan Sementara) No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, maka dirumuskan mengenai tujuan pendidikan adalah membentuk manusia pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Isi UUD 1945.

Dalam usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikan, kurikulum telah mengalami banyak perubahan. Kurikulum pertama yang digunakan adalah kurikulum 1950, kemudian berubah menjadi kurikulum 1958 yang dipergunakan sampai tahun 1964. Selanjutnya kurikulum 1964 yang pelaksanaannya mulai tahun 1965. Kurikulum 1964 inipun masih mengalami perubahan menjadi kurikulum 1968.<sup>32</sup> Memasuki Pelita II tepatnya pada tahun 1974-1975 diadakan pembaharuan kurikulum pendidikan yaitu kurikulum 1975. Penyusunan kurikulum 1975 ini berdasarkan pada TAP MPR No. II/MPR/1973.

Pada dasarnya penyusunan kurikulum 1975 dilakukan untuk penyempurnaan kurikulum 1968 yang dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Berdasarkan kurikulum 1975 yang dimaksud dengan Sekolah Dasar (SD) ialah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan sebagai dasar untuk mempersiapkan siswanya yang dapat maupun tidak dapat melanjutkan

---

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 133.

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>33</sup> Sedangkan tujuan pendidikan SD adalah lulusan memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik, memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, bekerja di masyarakat dan mengembangkan diri.<sup>34</sup> Pada kurikulum 1975 dikenal bidang-bidang studi Bahasa Indonesia yang mencakup bahasa daerah, Agama, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Kesenian, Ketrampilan, Olahraga dan Kesehatan, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan Matematika.<sup>35</sup>

### 4. Biaya Sekolah

Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Untuk itu setiap keluarga, masyarakat, dan pemerintah wajib memberikan pendidikan kepada anak-anak yang belum memperoleh pendidikan. Hal ini dirasa perlu guna memberikan kesempatan yang luas bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan dan meneruskan pendidikan mereka, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Mengenai biaya untuk Sekolah Dasar yang di dalamnya menyangkut pula biaya SD Inpres di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1974 diatur dalam Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 465 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Peraturan Sumbangan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan bahwa sumbangan pembinaan pendidikan yang selanjutnya disebut SPP adalah sumbangan yang dipungut dari wajib bayar (orangtua/wali murid) dan merupakan suatu dana untuk dipergunakan bagi keperluan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar. SPP ini dibayarkan dalam bentuk uang.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Oemar Hamalik, *Pengembangan Kurikulum: Dasar-Dasar dan Perkembangannya*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 219.

<sup>34</sup> Wardiman Djojonegoro, *op.cit.*, hlm. 228.

<sup>35</sup> Ahmadi, *Pendidikan dari Masa ke Masa*, (Bandung, Armico, 1987), hlm. 271.

<sup>36</sup> BPAD DIY, *Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang*

Besarnya SPP atas usul kepala sekolah, ditetapkan oleh bupati daerah atau walikotamadya untuk Daerah Tingkat II berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar, Prasekolah dan Pendidikan Luar Biasa kabupaten/kotamadya yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Kabupaten Bantul khususnya SD Inpres biaya SPP berkisar antara 50-100 rupiah yang dibayarkan setiap 12 kali dalam satu tahun ajaran. Jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit pada saat itu, maka di samping kewajiban membayar SPP yang ditetapkan pemerintah, dapat juga diberikan keringanan atau pembebasan dari kewajiban membayar SPP atas usul pihak terkait.<sup>37</sup>

#### 5. Sistem Ujian SD Inpres

Ujian merupakan kegiatan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dan kemampuan seorang siswa. Sistem ujian yang dilakukan oleh SD Inpres adalah ujian sekolah. Ujian sekolah merupakan ujian yang diselenggarakan dalam upaya menentukan tingkat kemampuan anak didik sehingga dapat diketahui kelayakan lulus atau tidaknya di tingkat SD. Tingkat kelulusan SD Inpres diukur dari mata pelajaran yang diujikan diantaranya Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Penentuan nilai rapot dengan menggunakan caturwulan sekali (empat bulan sekali) dan nilai rata-rata menggunakan angka 70, 73, dan 75.<sup>38</sup>

#### 6. Tenaga Pendidik dan Penjaga Sekolah

Guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan pendidikan dalam suatu sekolah. Tanpa seorang guru, gedung-gedung SD yang telah dibangun tidak akan ada gunanya. Oleh sebab itu, pengadaan dan penempatan guru menjadi kunci penting dalam SD Inpres. Guru-guru yang mengajar di SD

Inpres adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Memasuki masa Orde Baru selain permasalahan tentang kurangnya gedung-gedung sekolah, permasalahan lain adalah kurangnya tenaga pendidik. Hal ini dikarenakan oleh instruksi Presiden Soeharto terkait dengan pembangunan gedung SD Inpres secara besar-besaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah berusaha meningkatkan daya tampung penerimaan siswa melalui Sekolah Pendidikan Guru (SPG) maupun Kursus Pendidikan Guru (KPG), Program KPG Paket C secara regional sesuai dengan dana dan kemampuan pemerintah yang tersedia sehingga secara bertahap tiap daerah mampu memenuhi kebutuhan guru sendiri.<sup>39</sup>

Guru menjadi hal yang pokok dalam sebuah proses pendidikan. Maka dengan itu untuk menjadi seorang guru terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon guru. Karena nantinya guru-guru ini akan menciptakan anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa ini. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Berumur sedikit-dikitnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun.
- c. Mengisi daftar riwayat hidup menurut contoh yang telah ditetapkan.
- d. Berijazah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) atau Sekolah Guru Atas (SGA) atau Kursus Pendidikan Guru (KPG) Negeri atau Swasta yang telah disamakan dengan SPG/SGA/KPG Negeri dan disahkan oleh kepala sekolah dan camat.
- e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setempat.
- f. Surat pernyataan pelamar bahwa dia tidak pernah dijatuhi hukuman penjara/kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri karena melakukan tindak pidana kejahatan

---

*Pelaksanaan Peraturan Sumbangan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*, No. 465, 1974.

<sup>37</sup> BPAD DIY, *Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Peraturan Sumbangan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*, No. 465, 1974.

<sup>38</sup> Fuad Yulianto, *op.cit.*, hlm. 74.

---

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tanggapan dan Jawaban Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Atas Laporan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI Pada Masa Persidangan III Tahun 1983/1984*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 4.

- g. Tidak terlibat dalam G.30 S/PKI yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat, kecuali bagi mereka yang pada tanggal 1 Oktober 1965 belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun penuh, surat tersebut tidak diperlukan lagi.
- h. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat.
- i. Bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia.<sup>40</sup>

Setiap pelamar harus mengajukan lamaran secara tertulis yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan. Kemudian lamaran tersebut diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah. Para pelamar yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan, diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diperbantukan pada Daerah Otonom untuk dipekerjakan sebagai guru sekolah dasar dan diberikan gaji pokok bulanan sebesar 80% dari gaji pokok ditambah tunjangan yang dapat diberikan menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

Selain pengangkatan guru untuk mengatasi kekurangan guru yang terjadi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal lain yang menjadi permasalahan adalah banyaknya pencurian di gedung SD Inpres karena kurangnya pengamanan. Di bulan Januari tahun 1974 misalnya, telah terjadi lebih dari 10 kali pencurian dengan kerugian sekitar Rp. 400.000,-. Sedangkan yang menjadi sasaran pencurian adalah buku pelajaran untuk murid-murid. Hal ini tentu akan menghambat pelaksanaan belajar mengajar. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan usulan diantaranya: di tiap-tiap sekolah harus ditempatkan seorang penjaga malam/petugas lain yang lebih sesuai, misalnya mempekerjakan pesuruh/tukang kebun sekolah sebagai penjaga malam atau merekomendasikan untuk tinggal di komplek sekolah. Selain itu untuk mengatasi

permasalahan pencurian di SD Inpres adalah barang-barang dan alat-alat yang sangat berharga dapat dititipkan kepada instansi atau pejabat yang bersangkutan.<sup>42</sup>

#### **D. DAMPAK SEKOLAH DASAR INPRES**

Sekolah Dasar (SD) Inpres yang awalnya dibangun berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973 Tentang Program Bantuan Sekolah Dasar mampu menjadi sarana belajar untuk anak-anak usia sekolah yang belum tertampung pada sekolah yang sudah ada. Program bantuan sekolah dasar ini dilaksanakan di seluruh pelosok tanah air, dengan harapan supaya tercipta pendidikan yang merata. Pembangunan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan instruksi presiden pada setiap tahunnya. Tujuan dari kebijakan program bantuan sekolah dasar yang dicanangkan pemerintah selain untuk pemerataan kesempatan belajar adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan wajib belajar. Meskipun demikian program tersebut tetap menyebabkan dampak dalam berbagai bidang untuk masyarakat Indonesia. Dampak yang terlihat yaitu dalam bidang pendidikan dan sosial.

#### **Dampak dalam bidang pendidikan**

##### **1. Banyak Sekolah-Sekolah yang Berdiri**

Sekolah menjadi tempat untuk mendapatkan pendidikan selain dari keluarga dan lingkungan masyarakat. Program bantuan sekolah dasar yang bertujuan untuk memperluas dan meratakan pendidikan telah memberikan pengaruh terhadap banyaknya sekolah yang berdiri khususnya SMP dan SMA. Perluasan SMP yang dimulai pada tahun 1975/1976 merupakan antisipasi pemerintah terhadap meningkatnya jumlah lulusan SD yang mulai terasa pada tahun 1979. Begitu pula dengan perluasan SMA yang mulai dilaksanakan tahun 1978/1979 juga merupakan antisipasi pemerintah terhadap meningkatnya

---

<sup>40</sup> BPAD DIY, *Syarat Pengangkatan Guru Sekolah Dasar Negeri Pengganti Pensiunan/Berhenti/Meninggal Dunia*, No. 101255/0/4, 1976.

<sup>41</sup> Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (t.t), *op.cit.*, hlm. 147.

---

<sup>42</sup> BPAD DIY, *Surat Usulan Penjagaan Keamanan Sekolah Dasar Untuk Walikota/Bupati di Seluruh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, No. 372, 1974.

lulusan SMP pada awal tahun 1980-an.<sup>43</sup> Hal tersebut dilakukan supaya lulusan dari SD tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## 2. Bertambahnya Siswa Sekolah Dasar

Siswa merupakan objek utama dalam proses belajar mengajar baik itu pendidikan formal maupun non formal. Salah satu tujuan kebijakan SD Inpres yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah untuk meningkatkan jumlah siswa pada tingkat sekolah dasar diseluruh daerah di Indonesia. Adanya kebijakan SD Inpres ini juga diharapkan dapat mempermudah orangtua siswa untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya. Di Kabupaten Bantul adanya SD Inpres telah mempermudah orangtua dalam menyekolahkan anak-anaknya. Bentuk penerimaan masyarakat terhadap adanya SD Inpres adalah dengan menyekolahkan anak-anaknya ke SD Inpres.<sup>44</sup> Hal ini tentu dapat menambah jumlah siswa yang masuk ke SD Inpres.

## 3. Tingkat Kebodohan dan Buta Aksara Berkurang

Pendidikan pada dasarnya dilakukan untuk mencerdaskan bangsa. Banyaknya masyarakat yang mendapat pendidikan telah memunculkan suatu kaum elit baru, yaitu kaum terpelajar yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan hidup masyarakat.<sup>45</sup> Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini menjadikan kewajiban masyarakat dan khususnya pemerintah untuk bersama-sama menciptakan pendidikan yang bermutu bagi anak-anak bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Orde Baru melalui Instruksi Presiden No 10 Tahun 1973 mencanangkan kebijakan program bantuan

sekolah dasar atau yang biasa disebut dengan SD Inpres.

Program bantuan sekolah dasar ini dicanangkan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak usia 7-12 tahun yang belum atau tidak pernah bersekolah. Selain itu dicanangkannya kebijakan SD inpres adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat dan menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang terdidik dengan adanya SD Inpres.<sup>46</sup> Peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat menjadikan bangsa Indonesia memiliki mutu pendidikan yang tinggi. Keselarasan peningkatan mutu dapat terwujud setelah disediakan tempat belajar mengajar. Dengan banyaknya tempat pendidikan, maka banyak anak-anak usia sekolah tertampung, sehingga secara otomatis tingkat kebodohan dan buta aksara akan berkurang.<sup>47</sup>

## Dampak dalam Bidang Sosial

### 1. Memperluas Kesempatan Kerja

Secara umum pelaksanaan pekerjaan baik pembangunan gedung baru maupun rehabilitasi gedung SD yang sudah ada dilakukan dengan cara diborongkan. Dalam pemilihan pemborong diutamakan pemborong yang berdomisili di Kabupaten Bantul. Serta penggunaan material yang akan digunakan sebisa mungkin berasal dari Kabupaten Bantul jika hal itu terdapat di daerah tersebut. Tenaga kerja untuk pembangunan gedung SD baru maupun rehabilitasi diusahakan berasal dari Kabupaten Bantul.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan gedung SD Inpres sangat menguntungkan jika dilihat dari aspek sosial. Pekerjaan yang dilakukan secara borongan dan menggunakan pemborong daerah Kabupaten Bantul tentu memberi

<sup>43</sup> Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 186.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Sudi Parno 30 Maret 2018.

<sup>45</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: UGM Press, 1990), hlm. 294.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Sudi Parno 30 Maret 2018.

<sup>47</sup> Fuad Yulianto, "Dinamika SD Inpres di Kota Magelang", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2016), hlm. 91.

<sup>48</sup> Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi DIY, *Laporan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1982/1983*, (Yogyakarta: Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi DIY, 1983), hlm. 122.

keuntungan bagi pemborong itu sendiri. Selain itu penggunaan tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Bantul dapat menguntungkan karena dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini sekaligus dapat mengurangi pengangguran di daerah tersebut.

## 2. Terserapnya Lulusan Sekolah Pendidikan Guru

Faktor yang menentukan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan selain ditentukan oleh kelengkapan fasilitas juga ditentukan oleh faktor tenaga pengajar. Oleh karena itu setiap program pengembangan pendidikan, faktor penyediaan dan peningkatan kemampuan tenaga pengajar menjadi komponen utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga pengajar dimaksudkan untuk menunjang perluasan kesempatan memperoleh pendidikan.<sup>49</sup>

Pembangunan gedung SD Inpres yang dilakukan secara bertahap di setiap tahunnya menyebabkan banyaknya siswa yang bersekolah. Meningkatnya jumlah murid SD sebagai akibat dari perluasan kesempatan belajar membutuhkan tambahan guru dalam rangka menciptakan proses belajar mengajar yang bermutu. Ledakan jumlah siswa SD yang tidak sesuai dengan penambahan tenaga pendidik menjadi masalah yang cukup serius. Untuk mengatasi hal itu pemerintah berusaha supaya kebutuhan guru SD terpenuhi dalam jumlah yang cukup serta mutu yang memadai. Hal itu dilakukan dengan cara memperbanyak Sekolah Pendidikan Guru (SPG) maupun Sekolah Guru Atas (SGA) agar dapat memenuhi kebutuhan akan guru. Lulusan dari SPG/SGA inilah yang nantinya akan menjadi guru-guru untuk SD Inpres.

Pelaksanaan pendidikan pada program pendidik atau pengangkatan seseorang menjadi guru SD dilakukan melalui tes atau ujian penerimaan pegawai negeri. Agar dapat memenuhi jumlah yang ingin dicapai, maka penerimaan pegawai dilakukan di setiap propinsi khususnya Daerah Istimewa

Yogyakarta melalui media yang ada bahwa kesempatan itu terbuka bagi siapa saja Warga Negara Indonesia (WNI) dengan dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satu syarat tersebut adalah lulusan dari SPG/SGA. Siswa-siswa SPG/SGA yang telah lulus setelah melaksanakan tes tersebut akan diangkat oleh Gubernur/Kepala Daerah menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diperbantukan oleh daerah otonom untuk dipekerjakan sebagai guru SD.<sup>50</sup> Selama kurun waktu 1973-1977 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diangkat guru baik untuk SD yang telah ada maupun untuk SD Inpres sebanyak 3.140.<sup>51</sup> Seiring dengan perluasan kesempatan belajar dan semakin banyaknya kebutuhan guru yang harus dipenuhi maka pengangkatan guru melalui tes pegawai negeri mulai rutin dilaksanakan setiap tahun. Hal ini jika dilihat dari aspek sosial dapat mengurangi pengangguran, khususnya untuk lulusan SPG/SGA.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, kebijakan SD Inpres yang dicanangkan pemerintah pada awal Pelita II dilakukan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak usia 7-12 tahun yang belum bersekolah dan untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Indonesia. Latar Belakang dicanangkannya kebijakan SD Inpres oleh pemerintah dikarenakan pada waktu itu masih banyak anak-anak yang belum bersekolah karena berbagai hal dan masih tingginya tingkat putus sekolah pada siswa Sekolah Dasar (SD).

Permasalahan lain yang turut menjadi latar belakang kebijakan SD Inpres adalah tentang sarana dan prasarana untuk pendidikan yang masih kurang memadai untuk melaksanakan proses belajar mengajar baik itu

---

<sup>49</sup> Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 216.

---

<sup>50</sup> Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selama Pelita II 1974/1975 s/d 1978/1979*, (Yogyakarta: Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Propinsi DIY, t.t), hlm. 147.

<sup>51</sup> *Ibid.*,

gedung, buku bacaan, maupun kurikulum. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Orde Baru mengeluarkan Instruksi Presiden No 10 Tahun 1973 tentang program bantuan Sekolah Dasar.

Instruksi Presiden No 10 Tahun 1973 secara resmi dicanangkan mulai tahun 1973. Program ini dilaksanakan di seluruh Indonesia sehingga pembangunan yang dilakukan merata. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun gedung SD di seluruh Indonesia sebagai tambahan terhadap gedung sekolah yang telah ada, secara bertahap baik pembuatan maupun jumlahnya. Di Kabupaten Bantul pada tahun 1971 atau sebelum dicanangkannya kebijakan SD Inpres oleh Pemerintahan Presiden Soeharto, jumlah anak yang tidak bersekolah cukuplah banyak yaitu 186.647. Jumlah ini tentu sangatlah wajar karena pada tahun tersebut pembangunan sekolah untuk Kabupaten Bantul belumlah mendapat bantuan dari pemerintah. Adanya sekolah pada saat itu karena bantuan masyarakat. Sehingga pembangunan sekolah yang ada hanya berasal dari swadaya masyarakat dengan cara gotong royong.

Melihat banyaknya anak yang tidak bersekolah di Kabupaten Bantul maka daerah ini berdasarkan Instruksi Presiden No 10 Tahun 1973 mendapat bantuan program pembangunan sekolah dasar. Keinginan pemerintah untuk pemeratakan pendidikan di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara mulai dari pembangunan-pembangunan gedung sekolah baru maupun rehabilitasi gedung yang sudah ada, penyediaan alat-alat pelajaran, penyediaan buku pelajaran ataupun buku bacaan anak, dan pengangkatan guru untuk mengimbangi jumlah murid yang semakin meningkat, serta pembaharuan kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pembangunan gedung SD Inpres di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya. Biaya anggaran untuk pembangunan berasal dari Pemerintah Pusat, sedangkan untuk penyediaan lahan ditentukan oleh Pemerintah Daerah atas saran dari Camat. Setiap sekolah dasar yang baru akan dilengkapi dengan perabotan seperti bangku, meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya. Untuk mengimbangi pertambahan jumlah gedung dalam program ini dilakukan pengangkatan guru baru dan penjaga sekolah.

Selain itu akan disediakan buku-buku untuk pelajaran dan buku bacaan secara bertahap.

Kebijakan SD Inpres yang dicanangkan oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Bantul pada awal dicanangkannya kebijakan ini telah dapat meningkatkan jumlah murid sekolah dasar di Kabupaten Bantul. Namun memasuki tahun 1978 terjadi penurunan murid. Hal ini dikarenakan banyak dari mereka yang memilih keluar dari sekolah sebelum dinyatakan lulus. Mereka lebih memilih bekerja dibandingkan sekolah. Hal ini kebanyakan terjadi di daerah pegunungan yang masih minim kesadaran tentang arti pentingnya sekolah.

Setiap kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah tentu memiliki dampak yang berpengaruh bagi masyarakat termasuk juga kebijakan SD Inpres yang dicanangkan pemerintah tahun 1973. Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan SD Inpres lebih mengarah ke dampak yang positif. Dampak tersebut yang terlihat yaitu dalam bidang pendidikan dan sosial. Dalam bidang pendidikan, kebijakan SD Inpres telah mendorong berdirinya sekolah-sekolah di Kabupaten Bantul. Hal ini tentu dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat khususnya anak-anak yang akan masuk atau melanjutkan pendidikan. Selain hal tersebut adanya SD Inpres di Kabupaten Bantul dapat mempermudah orangtua dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Dampak lain di bidang pendidikan adalah kebijakan SD inpres dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat dan menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang terdidik dengan adanya SD Inpres. Dengan hal ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kebodohan dan angka buta aksara. Dalam bidang sosial dampak yang ditimbulkan adalah dengan adanya pembangunan SD Inpres dapat mengurangi pengangguran karena setiap proses pembangunannya selalu dilibatkan dengan masyarakat setempat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Arsip**

BPAD DIY, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 1974.*

BPAD DIY, *Pengangkatan Guru Sekolah Dasar*, Senarai Arsip Bagian Umum 1B, No.2861.

BPAD DIY, *Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Daftar Rekapitulasi Laporan Bulanan Pelaksanaan Pembangunan Gedung SD 1974/1975*, No. 6. 1974.

BPAD DIY, *Alokasi SD Inpres Tahun 1975/1976*, No. K 742. 1975.

BPAD DIY, *Daftar Sekolah Dasar Guru dan Murid Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bulan April 1975*, dalam Senarai Arsip Bagian Umum No. 1099.

BPAD DIY, *Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1976/1977 Perincian Kemajuan Fisik Tiap Tiap Kabupaten/Kotamadya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, No. K5. I27. 1977.

BPAD DIY, *SK Gubernur DIY No 110 dan 465 Tahun 1974*, Senarai Arsip Bagian Umum Provinsi DIY IA, No. 535.

BPAD DIY, *Surat Edaran Perlunya Penjagaan Keamanan Sekolah*, Senarai Arsip Bagian Umum IB

Depo Arsip Kabupaten Bantul, *Gedung SD Inpres di Bantul*, Senarai Arsip Foto, No. 269.

### **Buku dan Artikel**

Ahmadi, *Pendidikan dari Masa ke Masa*, Bandung, Armico, 1987.

Beeby C.E, *Pendidikan Di Indonesia Penilaian dan Pedoman Perencanaan*, Jakarta: LP3ES, 1981.

Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selama Pelita II 1974/1979*, Yogyakarta: Biro Pembangunan Propinsi DIY.

Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi DIY, *Laporan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1982/1983*, Yogyakarta: Biro Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi DIY, 1983.

Biro Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 1971: Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Biro Pusat Statistik, 1971.

Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pembakuan Bangunan Sekolah Dasar*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tanggapan dan Jawaban Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Atas Laporan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI Pada Masa Persidangan III Tahun 1983/1984*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.

Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.

I.L Pasaribu dan Simandjuntak, *Pendidikan Nasional: Tinjauan Paedagogik Teoritis*, Bandung: Tarsito, 1982.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, , Terj. Nugroho Notosusanto, *Understanding History: A Primer Of Historical Method*, Jakarta: UI Press, 1975.

Madyo Eko Susilo dan RB Kasihadi, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Semarang: Effhar Offset, 1993.

Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2017.

Oemar Hamalik, *Pengembangan Kurikulum: Dasar-Dasar dan Perkembangannya*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Onny S Prijono, *Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir*, Jakarta: CSIS, 1979.

Onny S Prijono dan A.M.W Pranarka, *Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir Bagian II A Langkah-Langkah Kebijaksanaan*, Jakarta: CSIS, 1980.

Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.

**Skripsi**

Fuad Yulianto, “Dinamika SD Inpres di Kota Magelang”, *Skripsi* Yogyakarta: UNY, 2016.

